**KABINET PERTAMA
R. I. S.**

M. Suting

4/11 1950

KEMENTERIAN PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KABINET PERTAMA

R. I. S.

PROGRAM KABINET R.I.S.

1. Menjelenggarakan supaya pemindahan kekuasaan ketangan bangsa Indonesia diseluruh Indonesia terdjadi dengan seksama; mengusahakan reorganisasi K.N.I.L. dan pembentukan Angkatan Perang R.I.S. dan pengembalian tentara Belanda ke negerinja dalam waktu jang selekas-lekasnja.
2. Menjelenggarakan ketenteraman umum, supaya dalam waktu jang sesingkat-singkatnja terdjamin berlakunja hak-hak demokrasi dan terlaksananya dasar-dasar hak manusia dan kemerdekaannya.
3. Mengadakan persiapan untuk dasar hukum, tjara bagaimana rakjat menjatakan kemauannya menurut asas-asas Undang-undang Dasar R.I.S., dan menjelenggarakan pemilihan umum untuk Konstituante.
4. Berusaha memperbaiki keadaan ekonomi rakjat, keadaan keuangan, perhubungan, perumahan dan kesehatan. mengadakan persiapan untuk djaminan sosial dan penempatan tenaga kembali kedalam masjarakat; mengadakan peraturan tentang upah minimum; pengawasan Pemerintah atas kegiatan ekonomi agar kegiatan itu terudjud kepada kemakmuran rakjat seluruhnja.
5. Menjempurnakan perguruan tinggi sesuai dengan keperluan masjarakat Indonesia dan membangunkan pusat kebudajaan nasional; mempergiat pemberantasan buta huruf dikalangan rakjat.

6. Menjelesaikan soal Irian dalam setahun ini djuga dengan djalan damai.
 7. Mendjalankan politik luar negeri jang memperkuat kedudukan R.I.S. dalam dunia internasional dengan memperkuat tjita-tjita perdamaian dunia dan persaudaraan-bangsa-bangsa.
Memperkuat perhubungan moreel, politik dan ekonömi antara negara-negara Asia Tenggara.
Mendjalankan politik dalam Uni, agar supaja Uni ini berguna bagi kepentingan R.I.S.
Berusaha supaja R.I.S. mendjadi anggauta Per-serikatan Bangsa-bangsa.
-

KABINET R.I.S. PERTAMA

Meliputi kepentingan bangsa.

PADA tanggal 20 Desember 1949 di Presidenan telah dilantik Presiden R. I. S. Pertama, P. J. M. Ir. Soekarno. Pembentukan kabinet baru ini harus ditinjau dalam hubungan hasil2 K.M.B. dimana Indonesia diwakili oleh orang2 Republik dan B.F.O., hingga dengan sendirinja anggauta2 kabinet itu terdiri dari orang2 Republik dan B.F.O. jang berarti meliputi seluruh kepulauan Indonesia. Ia berdasarkan atas kepentingan nasional. Dari fihak Republik ada 9 orang dan dari fihak B.F.O. 5 orang. Mereka jang dari Republik umumnja sudah kita kenal. Dalam pada itu mereka dari B.F.O. beberapa orang sudah sering disebut2 namanja. Tapi tidak ada salahnja diberi pendjelasan sedikit.

Menteri Dalam Negeri R.I.S. Anak Agung Gde Agung selama ini mendjadi Perdana Menteri N.I.T.

Arnold Mononutu adalah pemimpin dari GAPKI di N.I.T. Namanja sering disebut berhubung dengan oposisinja dalam parlemen N.I.T. dan pada bulan Februari 1948 pernah memimpin Goodwill Mission parlemen N.I.T. ke Republik.

Mr. Kosasih dulu Residen Republik di Djakarta jang berkedudukan di Krawang. Kemudian mendjadi anggota B.F.O.

Sultan Hamid adalah ketua B.F.O.

Dr. Soeparmo adalah anggauta parlemen Negara Djawa Timur.

DALAM DAN LUAR NEGERI.

DENGAN dibentuknja kabinet R.I.S. pertama ini tentu ada orang2 jang belum merasa puas. Beberapa golongan memang tidak mendapat wakil didalamnja. Dalam pada itu apa jang dilakukan oleh formateur, P. M. Moh. Hatta, dihubungkan dengan keadaan dan tingkatan politik sekarang adalah usaha jang dipikirkan sebidjaksana2-nja. Dalam menjusun anggauta kabinet itu tidak bisa dilupakan keadaan2 dalam Negeri dan keadaan2 Luar Negeri.

Ke dalam Negeri diusahakan untuk menjelenggarakan perimbangan antara beberapa kekuasaan politik dalam masyarakat. Selain dari pada itu djuga harus mengingat soal2 psychologie, perasaan2. Hal2 ini tentu mendjadi perhatian dari pada pembentuk kabinet jang ditjoba untuk dipetjahnja tapi jang barang tentu tidak sekaligus. Lagipula mas'alah jang dihadapi oleh kabinet baru ini begitu banjak matjamnja. Ditambah lagi bahwa tiap2 masa peralihan membawa kesulitan. Pada tiap masa peralihan lebih dulu diusahakan untuk menjesuaikan diri pada keadaan2 baru jang berlainan dengan keadaan ketika belum ada negara R.I.S.

Dimasa jang lampau pemimpin2 kita didaerah Republik dengan langsung memimpin negara Republik Indonesia jang tidak begitu luas seperti R.I.S. jang terdiri dari negara2 bagian dan daerah. Susunan ini mendorong kepada orang2 pemerintahan untuk bekerdja dengan tjara baru jang lain dari pada ketika mereka memegang pemerintah Republik Indonesia. Pun tenaga2 baru dari kalangan B.F.O.

harus menyesuaikan pada sjarat2 bekerdja untuk negara sendiri lepas dari pimpinan asing. Tjara bekerdja dan berpikir merdeka.

Ke Luar Negeri pemerintah ini harus menjelamatkan Negara R.I.S. ditengah-tengah pergolakan dunia dimasa sekarang dan dihari depan, dengan pedoman pasal 7 daripada programnja. Jaitu memperkuat tjita2 perdamaian dunia dan persaudaraan bangsa2; memperkuat perhubungan moreel, politik dan ekonomi antara negara2 Asia-Tenggara; mendjalankan politik dalam Unie agar supaya Unie ini berguna bagi kepentingan R.I.S.; berusaha supaya R.I.S. mendjadi anggauta UNO.

Kabinet ini harus memperhatikan kekuatan2 di dunia jang satu sama lain pengaruh-mempengaruhi jang tidak dapat diabaikan begitu sadja oleh tiap2 negara manapun, djuga tidak oleh negara kita. Hal2 ini merupakan suatu mas'alah besar jang harus diperdjungkan di kemudian hari.

Sebagai diketahui, setelah tertjapai hasil2 K.M.B., maka banjak sambutan dari luar Negeri jang umumnja menjatakan sympatinja terhadap R.I.S. Ini berarti bahwa perdjungan masih berat, djustru untuk mempertahankan sympati (nama baik). Bahkan tidak hanja itu sadja, melainkan menambah atau memperbesar sympati itu hingga bisa dilaksanakan dengan njata. Banjak jang sudah menjanggupkan matjam2 tawaran. Tapi segala itu harus ditinjau dengan teliti dan diselidiki untuk kepentingan negara dan rakjat kita.

Untuk Pembangunan Negara kita diperlukan mesin2 dan alat2.

KESEMPATAN MENGRITIK.

KALAU ada hal2 mengenai susunan kabinet ini dirasa kurang memuaskan, maka masih ada kesempatan bagi masyarakat dan rakyat untuk mendjalankan hak2-nja melakukan tindjauan dan kritik atas beleid Pemerintah. Perwakilan rakyat, pers Indonesia sebagai djuru bitjara rakyat, partai2 dapat mempergunakan haknja sebagai penilik atas beleid itu, berdasarkan atas kelandjutan demokrasi jang ada di Negara kita.

Kita katakan diatas bahwa pembentukan kabinet ini adalah kelandjutan dari pada hasil2 K.M.B. Bersama dengan itu direntjanakan djuga U.U.D. R.I.S. sementara jang disahkan di Djakarta tanggal 14 Desember 1949 malam oleh wakil Republik dan B.F.O. di Pegangsaan Timur 56.

Perlu didjelaskan disini bahwa rentjana U.U.D. itu adalah rentjana jang sudah dibikin oleh wakil Republik dan B.F.O. pada Konferensi Antar Indonesia di Djakarta, babak ke II, sebelum delegasi2 berangkat ke Den Haag.

Sebagai diketahui U.U.D. sementara R.I.S. itu masih banjak menimbulkan kritik dikalangan K.N. Pusat, Pers dan Partai2. Tetapi hal itu tidak mengurangi usaha Perdana Menteri Hatta untuk menjempurnakan pemerintahan R.I.S., hal mana dapat dipeladjar dari program kabinet. Pasal 4 dari program kabinet itu mengatakan :

KEMAKMURAN RAKJAT.

„**B**ERUSAHA memperbaiki keadaan ekonomi rakjat, keadaan keuangan, perumahan, kesehatan, mengadakan persiapan untuk djaminan sosial dan penempatan tenaga kembali kedalam masjarakat; mengadakan peraturan tentang upah minimum; pengawasan Pemerintah atas kegiatan ekonomi agar kegiatan itu terudjud kepada kemakmuran rakjat seluruhnja”.

Melaksanakan pasal ini adalah pekerdjaan besar. Para pegawai Republik Indonesia harus bekerdja sama dengan pegawai bangsa Belanda, dengan pegawai bangsa Indonesia bekas pegawai Pemerintah Hindia Belanda. Tjara bekerdja ini harus disertai dengan perubahan besar dalam djiwa mereka jang disebut belakangan itu, jaitu perubahan batin dari alam djadjahan ke alam merdeka. Untuk menjempurnakan kemakmuran rakjat seluruhnja perlu adanja ekonomi nasional jang akan menghilangkan sistem djadjahan. Mau tidak mau pegawai2 itu harus melalui djalan jang sulit, karena adanja berlainan alam pikiran oleh keadaan2 jang lalu. Hal2 ini akan berpengaruh kepada pekerdjaan jang dihadapi sehari-hari dan seterusnya akan berpengaruh djuga kepada usaha2 jang langsung mengenai kepentingan rakjat.

Selanjutnja inipun akan dirasai djuga oleh Pemerintah.

DJAMINAN SOSIAL.

KALAU kita membandingkan program kabinet tsb. jang mengenai urusan sosial, dengan keadaan dimasa pendjadjahan, maka haruslah diakui, bahwa banjak bedanja. Malahan boleh dikatakan djauh bertentangan. Prinsip kaum modal ditanah djadjahan ialah untuk mengambil untung sebanjak2nja dengan memeras keringat dan tenaga buruh Indonesia. Sedang prinsip dari pada kabinet ini ialah untuk mendjamin kemakmuran rakjat, mengurus soal upah buruh, mengatur kesehatan rakjat, dll. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tudjuannja ialah untuk mengangkat penghidupan rakjat umumnja jang miskin dan sengsara itu keneratja hidup jang lajak. Jaitu hidup jang bebas dari kemiskinan. Walaupun dalam UUD. RIS belum ditjantumkan fatsal seperti jang dimuat dalam UUD. Republik Indonesia fatsal 33, tapi ada satu hal jang dapat dikatakan bahwa isi dan makna fatsal itu dimasukkan dalam dasar „Pantja Sila” R.I.S. Diantaranja ialah keadilan sosial. Dalam program kabinet RIS jang pertama itu adalah soal jang mirip dengan itu jang intinja dapat disimpulkan dalam kalimat2 „memperbaiki ekonomi rakjat, kesehatan, mengadakan persiapan untuk djaminan sosial dan penempatan tenaga kembali kedalam masjarakat, mengadakan peraturan tentang upah minimum”.

Kalau hal2 itu dapat dilaksanakan, maka dengan kemakmuran rakjat dapat pula ditjapai berkembangnja kebudayaan bangsa pada umumnja.

Djadi tingkat (fase) pertama jang dapat dila-

kukan ialah mengubah tjara berpikir dan bekerdja kolonial, dan diganti dengan tjara bekerdja dan berpikir nasional. Nasional jang berarti djuga menaikkan tingkatan hidup rakjat seluruhnja hingga mendjadi lajak. Sebab kekurangan pada penghidupan pun akan berakibat kepada soal2 keamanan. Rakjat ta'kan hidup aman, kalau masih harus akan memikirkan apa jang akan dimakan buat esok harinja. Keadaan ini harus dibanteras dengan lambat laun dengan memperbaiki organisasi dipemerintahan dan dikalangan masjarakat, buruh, tani.

KEAMANAN SOAL KEPERTJAJAAN.

LAIN dari pada itu soal keamanan dalam negeri jang dibeberapa daerah Indonesia ditangan Belanda akan diurus sendiri oleh bangsa Indonesia. Sebagian besar dari pekerdjaan ini dalam R.I.S. dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Negara, jang sudah biasa bekerdja dibawah pimpinan bangsa sendiri. Mereka itu dari sedikit demi sedikit sudah ditempatkan dikota2 besar jang tadinja diduduki oleh Belanda. Sebagaimana kita batja disurat-surat kabar mereka itu disambut dengan riuh rendah oleh rakjat2 ditempat-tempat tsb. Ini menandakan adanja kepertjajaan terhadap alat2 Negara dari Republik Indonesia, bahwa alat2 kitapun sanggup mendjamin keamanan dalam negeri. Untuk melaksanakan ini ada satu faktor jang penting, jaitu „kepertjajaan”. Dengan tidak adanja kepertjajaan terhadap alat2 negara tadi, maka sulitlah usaha untuk mendjaga keamanan.

Dengan adanya djaminan keamanan dalam negeri itu jang bersangkutan bukanlah hanja nasib rakjat dan penduduk berbagai bangsa, melainkan djuga nama baik dari pada negara R.I.S. dimana dunia internasional, jang selalu mengamati segala gerak-gerik dan usaha bangsa kita jang telah memiliki kemerdekaannya. Dengan ini bangsa kita selalu menghadapi udjian, apakah dia benar2 sanggup mengurus dirinja sendiri atautkah masih memalukan. Bangsa kita seluruhnja ikut menanggung djawab akan nama baik atau buruk dari dirinja sendiri dan dari negaranya jang baru ini. Maka oleh karena itu mendjaga keamanan itu tidak hanja tergantung atau dikerdjakan oleh alat2 negara sadja, tetapi djuga harus dibantu oleh rakjat dan penduduk sendiri.

Dengan keamanan inilah akan dapat diselenggarakan berbagai-bagai usaha mengenai pemilihan umum, pendidikan rakjat, penjelenggaraan kebudayaan dalam arti jang seluas-luasnja.

**

SEBAGAI diketahui soal Irian jang setelah K.M.B. tetap mendjadi perhatian dari Pemerintah Republik Indonesia dan kalangan2 B.F.O., dimasukkan dalam program kabinet R.I.S. pasal 6. Ini akan diselesaikan dalam satu tahun dengan damai, sesuai dengan apa jang ditentukan dalam K.M.B.

Dengan pendjelasan singkat ini dapatlah kita ambil kesimpulan, bahwa menjelenggarakan kemerdekaan selama Republik Indonesia dan waktu R.I.S.

nanti ada banjak perbedaan2-nja. Hingga masalah2 baru akan kita hadapi bersama-sama dengan saudara2 kita diluar Republik, jang berarti mengutjurkan keringat dan pengerahan tenaga jang seada-adanja dengan sehebatnja.

Merdeka!

Jogjakarta, 21 Desember 1949.
KEMENTERIAN PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA.

SUMPAH PARA MENTERI R.I.S.

„Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saja, untuk diangkat mendjadi Menteri, langsung ataupun tak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali menerima dari siapapun djuga, langsung ataupun tak langsung sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah (berdjandji) setia kepada Konstitusi, bahwa saja akan memelihara segala peraturan jang berlaku bagi Republik Indonesia Serikat, bahwa saja akan mengabdikan dengan setia kepada Nusa dan Bangsa dan Negara dan bahwa saja akan memenuhi dengan setia segala kewadjiban jang ditanggungkan kepada saja oleh jabatan Menteri”.

Penjumpahan Perdana Menteri Kabinet R.I.S. pertama.

RIWAJAT HIDUP MENTERI² R. I. S.

Drs. Moh. Hatta.

Dilahirkan di Bukittinggi pada tg. 12 Agustus, 1902. Sesudah tammat sekolah Europeesche Lagere School dan Mulo, pada tahun 1919 ia masuk PHS dan tammat ditahun 1921. Tahun 1922 ia pergi ke Nederland untuk meneruskan peladjarannja pada Economische Hogeschool di Rotterdam. Dalam tahun 1932 ia mendjadi Doctorandus dalam ilmu perniagaan.

Waktu masih bersekolah di Mulo, Hatta sudah mulai turut pergerakan. 1918—1920 ia mendjadi bendahari dan penulis Jong Sumatranen Bond tjab. Padang; 1920—1921 mendjadi bendahari pedoman besar JSB di Djakarta. 1922—1925 bendahari Perhimpunan Indonesia di Nèderland serta duduk dalam redaksi madjallah perhimpunan tsb. bernama „Indonesia Merdeka”. 1925—1930 Hatta dipilih mendjadi ketua P.I. 1927—1931 mendjadi anggota putjuk pimpinan League against Imperialism and Colonialism di Berlin.

Agustus 1926 Hatta turut Kongres Domocra-tique International ke 6 di Bierville (Paris). Febr. 1927 mengundjungi kongres Liga di Brussel sebagai utusan perhimpunan2 nasional Indonesia di Nèderland. Agustus '27 mengundjungi kongres internasional wanita di Gland (Swis).

23 Sept. 1927 Hatta ditangkap dan dipendjara di Den Haag; 22 Maret 1928 ia dibebaskan kembali.

1932 kembali ke Indonesia dan mendjadi ketua Pendidikan Nasional Indonesia dari 1933—1934. Ditahun 1934 ia dipendjarakan oleh Pem. Belanda di Tjipinang (Djakarta) setahun lamanja dan ditahun 1935 diinternir di Boven Digul, bersama2 Sjahrir. 1936 ia dipindahkan ke Banda dan Febr. 1942 dibawa ke Sukabumi. Dengan takluknja Hindia Belanda terhadap Djepang 9 Maret 1942, Hatta bebas kembali.

17 Agustus 1945 bersama2 Bung Karno, ia memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hatta mendjadi wakil Presiden. Sesudah P.M. Amir

Sjarifuddin meletakkan djabatannja ditahun 1948, Hatta di tundjuk sebagai formateur kabinet baru. 31 Djan. 1948 ia berhasil membentuk kabinet. Pada tanggal 19 Desember 1948, Hatta bersama2 Sukarno, Sjahrir dll. ditangkap oleh tentera Belanda jang melakukan serangan tiba2 terhadap Republik. 27 Desember Hatta di internir di Bangka. 6 Djuli 1949 ia kembali ke Jogjakarta bersama2 Sukarno dll. 20 Desember 1949 Moh. Hatta mendjadi Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat.

Sultan Hamengku Buwono IX.

Dilahirkan di Jogjakarta pada tahun 1912. Setelah tammat Europ. Lagere School, dan meneruskan peladjarannya pada sekolah menengah, ia kemudian pergi ke Netherland dan masuk HBS disana. Tammat HBS ia menuntut peladjaran ilmu hukum pada Universiteit Leiden sampai 1939. Sebelum dapat menamatkan peladjarannya disekolah tinggi itu, Hamengku Buwono di panggil kembali oleh ajahnja yang sedang gering dan tidak lama kemudian wafat.

Tahun 1940, ia dinobatkan mendjadi Hamengku Buwono IX, Sultan Jogjakarta.

Hamengku Buwono sangat populer dikalangan rakjat Jogjakarta selama pendudukan Djepang. Keteguhan hatinja dalam menghadapi Djepang, mendjadi tauladan bagi banjak orang.

Pada petjahnja revolusi ditahun 1945, Hamengku Buwono segera menjumbangkan tenaganja kepada negara muda Indonesia jang baru sadja diproklamirkan itu. Dalam kabinet2 Sjahrir ia beberapa kali mendjadi Menteri Negara dan djuga dalam Kabinet Sjarifuddin.

Selama Jogjakarta dan daerah Republik lainnja diduduki oleh tentera Belanda Hamengku Buwono mendjadi lambang perlawanan rakjat Indonesia terhadap penindasan Belanda, dan sikapnja mengagumkan orang, baik dalam maupun diluar negeri.

Sehabis kembalinja Republik ke Jogja ia mendjadi Menteri Pertahanan dalam Kabinet Hatta dan djuga Wakil Perdana Menteri untuk Djawa.

Panitia Persiapan Nasional jang didirikan di Djakarta untuk mempersiapkan segala sesuatu jang bersangkutan dengan penjerahan kedaulatan, menundjuk Hamengku Buwono sebagai koordinator keamanan diseluruh Indonesia. Dalam djabatannja itu ia mengadakan perdjalanan keliling setjara kilat keberbagai2 tempat di Indonesia.

Dalam kabinet pertama R.I.S. Hamengku Buwono mendjadi Menteri Pertahanan.

Ide Anak Agung Gde Agung.

Dilahirkan 24 Djuli 1919 di Gianjar (Bali) sebagai putera kedua dari zelfbestuurder Gianjar. Sesudah tammat Lagere School (Bali) dan Sekolah Menengah di Malang, ia melandjutkan peladjarannja di Rechtshogeschool Djakarta. Ia tidak dapat menamatkan peladjarannja, berhubung dengan petjahnja perang dengan Djepang.

Dalam pendudukan Djepang, ia kembali ke Bali dan ditahun 1943 mendjadi zelfbestuurder Gianjar.

Dimasa sesudah takluknja Djepang, Anak Agung mendjalankan rol penting dalam „tjita2 Malino”, tjiptaan Van Mook. Dalam Kabinet NIT pertama dibawah Daeng Malewa, Anak Agung mendjadi Menteri Dalam Negeri dan dalam kabinet ke 2 Nadjamudin ia mendjadi Wk. Perdana Menteri.

Dalam bulan Agustus 1947 Anak Agung pergi ke New York sebagai anggota delegasi NIT, yang dengan sia-sia mencoba memperdengarkan suaranya dalam Dewan Keamanan, mengenai aksi militer I yang dilakukan Belanda. Dewan Keamanan menolak untuk memeriksa mereka.

Anak Agung juga menjalankan rol penting dalam pembentukan BFO ditahun 1947. Bersama Dr. Suparmo, ia menjadi wakil ketua BFO. Dalam Kabinet pertama RIS, Anak Agung menjadi menteri Dalam Negeri.

Mr. Sjafrudin Prawiranegara.

Lahir di Anjerkidul (Banten) pada tg. 28 Febr. 1911. Selesai sekolah rendah, Mujo AMS (1931), ia meneruskan peladjarannya pada Rechtshogeschool Djakarta dan di tahun 1940 mendapat gelaran Mr. Mendjadi kepala kantor padjak di Kediri selama pendudukan Djepang.

Maret 1946 mendjadi wakil menteri Keuangan dalam kabinet ke-2 Sjahrir dan dalam kabinet ke-3 Sjahrir (1946—1947) mendjadi Menteri. Dalam kabinet Hatta (1948) ia mendjadi Menteri Kemakmuran.

Dalam agresi militer ke-2 Belanda, ia berada di Sumatera dan mendjadi kepala Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Sesudah ia menjerahkan mandaatnja kembali kepada kabinet Hatta, ia diangkat

mendjadi wakil Perdana Menteri berkedudukan di Kotaradja, Atjeh, Sumatera.

Dalam KNP Sjafrudin mendjadi pemimpin Fraksi Masjumi. Ia adalah anggota Dewan Partai Masjumi. Dalam kabinet RIS mendjabat Menteri Keuangan.

Ir. Djuanda.

Dilahirkan di Tasikmalaja pada 10 Djuli 1911. Sesudah tammat sekolah rendah, kemudian masuk HBS dan ditahun 1929 masuk Technische Hogeschool Bandung. Ditahun 1933 mendapat gelaran civiel-ingenieur.

1933—1937 mendjadi direktur sekolah menengah Muhammadiyah Djakarta. 1937—1942 bekerdja pada Provinciale Waterstaat Djawa Barat di Djakarta.

Sesudah perang, ia mendjadi wakil Menteri Perhubungan dalam kabinet pertama Sjahrir (1945—1946). Dan dalam kabinet kedua Sjahrir (1946) mendjadi Menteri Perhubungan dan Pekerdjaan Umum. Dalam kabinet Hatta ia mendjadi Menteri Negara. Dalam delegasi Republik ke KMB ia mendjadi pemimpin seksi Republik tentang soal keuangan dan perekonomian. Dalam kabinet RIS mendjadi menteri Kemakmuran.

Dr. Suparmo

Dr. Suparmo Honggopati Tjitrohupojo lahir di Solo pada tanggal 14 Djuli 1906. 1932 tammat sekolah NIAS di Surabaya dan mendjadi Indisch Arts. Kemudian bekerdja selama 1 tahun dirumah sakit Ziekenzorg Solo dan bekerdja 3 tahun lamanja pada Mangkunegaran. Sampai 1942 bekerdja pada dinas pemberantasan penjakit kusta di Semarang dan Blora, 1942 mendjadi residentie arts di Pamekasan.

Sesudah perang mendjadi wakil residen Republik di Madura. Sesudah Madura didjadikan negara bagian, Dr. Suparmo mendjadi wakilnja di BFO, Mei 1948 ia mendjadi wakil ketua II dari BFO. Agustus 1949 ia mendjadi direktur djawatan kesehatan Madura.

Ir. H. Laoh.

Ir. Herling Laoh dilahirkan di Tompaso (Menado) pada tanggal 23 Agustus 1902. Setelah tammat Europeese Lagere School meneruskan peladjarannya pada sekolah menengah (HBS) dan pada tahun 1928 mendapat gelar Ir. pada sekolah Tinggi Tehnik di Bandung. Dalam tahun 1927 — 1928 ia mendjadi assistent dari Prof. de Vos dalam waterbouwkunde di Bandung. Kemudian mendjabat ingenieur projectant pada djawatan irrigasi di Modjokerto.

Dalam tahun 1942 mendjadi Ir klas satu pada Djawatan Pengairan dan diperbantukan di Palembang. Waktu pendudukan Djepang ia berada di Tasikmalaja sebagai Ir pada Djawatan Pengairan.

Setelah perang ia mendjadi wakil Menteri Pekerdjaan Umum dalam ketiga kabinet Sjahrir. Pun

dalam kabinet Amir Sjarifuddin mendjabat wakil Menteri Pekerdjaan Umum, setelah Djuli 1947 ia mendjadi Menteri. Dalam Kabinet2 Hatta pun ia memegang portefeuille Pekerdjaan Umum dan Perhubungan.

Dalam tahun 1945 Ir. Laoh mendjadi anggauta P.N.I. Sebagai anggauta dari Delegasi Republik ia menghadiri konperensi economi di Havana. Pada waktu aksi militer jang kedua mula2 ia dipendjara tetapi kemudian dibebaskan. Dalam tahun 1949 pergi ke Manila sebagai ketua missie pembelian barang2 untuk Republik.

Dalam kabinet RIS jang pertama ini mendjadi Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerdjaan Umum.

Prof. Mr. Dr. Supomo.

Dilahirkan tg. 22 Djanuari 1903 di Sukahardjo (Solo). Sehabis tamat sekolah Europ. Lagere School dan Mulo, ditahun 1920 ia masuk Rechts-school. Kemudian pergi ke Nederland masuk Univer-siteit Leiden bag. Hukum. Ditahun 1927 mendjadi Doctor dalam ilmu hukum.

Sekembalinja di Indonesia ditahun 1927 ia be-kerdja pada landraad di Jogja. 1930 Supomo pindah ke Dept. V. Justitie Djakarta, untuk menjelidiki hu-kum adat Djawa Barat. 1933 mendjadi ketua landraad Purworedjo, 1938 pegawai tinggi Dept. V Justitie merangkap guru besar luar biasa dalam hukum adat pada Sekolah Tinggi Kehakiman Djakarta. 1941 men-djadi guru besar biasa pada sekolah tinggi tersebut. Dalam kabinet pertama Republik, Supomo men-

jadi menteri Kehakiman sampai Nop. ketika kabinet itu diganti oleh Kabinet Sjahrir.

Maret 1947 ia menjadi guru besar pada Universitas Gadjah Mada. Prof. Supomo seringkali ikut dalam perundingan dengan Belanda. Dalam delegasi Republik di KMB, ia menjalankan rol penting pada bagian ketatanegaraan dan hukum-ketatanegaraan. Ia ikut pula dalam merantjangkan Undang2 Dasar sementara RIS.

Supomo menjadi Menteri Kehakiman dalam Kabinet RIS, dan beliau menjadi anggota PNI.

Dr. Abu Hanifah.

Dr. Abu Hanifah Gelar Datuk Maharadja Emas lahir di Padang Djanuari 1906. Masuk sekolah rendah, kemudian ke STOVIA dan 1932 mendjadi Indisch arts. Kemudian meneruskan peladjarannya di Geneeskundige Hogeschool Djakarta dan tahun 1941 mendjadi arts.

1932—1934 mendjadi dokter rumah sakit gemeente Medan bagian kliniek penjakit paru2. 1934—1940 mendjabat landschaparts dengan merangkap pekerdjaan D.V.G. dan M.G.D. di Indragiri. Dari tahun 1941—1942 dokter kapal pelabuhan Tandjung Priok, kemudian mendjadi dokter Rumah Sakit Umum Negeri Djakarta bagian penjakit dalam. Dalam zaman Republik tidak begitu actief dalam kalangan politik melainkan dalam lapangan kebudayaan.

(sandiwara dengan nama samaran „Dr. El Hakim”).
Ikut dalam delegasi Indonesia dalam Inter-Asian
Conference jang diadakan di New Delhi. Sekarang
mendjabat Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan
Kebudajaan dalam kabinet R.I.S. jang pertama.

Dr. J. Leimena.

Dr. Johannes Leimena dilahirkan di Ambon pada 6 Maret 1905. Tammat sekolah rendah dan Mulo, lalu masuk sekolah dokter STOVIA ditahun 1922. Tahun 1930 ia mendjadi Indisch Arts. Tahun 1939 ia mengadakan promosi mendjadi Doctor dalam ilmu Ke-tabiban.

1930—1931 ia bekerdja dirumah sakit CBZ Djakarta. 1931—1941 diperbantukan pada rumah sakit zending di Bandung. Dizaman Djepang mendjadi kepala rumah sakit „Baju Asih” di Purwakarta dimana sedjak 1942 mendjadi direktur. Maret 1946 mendjadi wakil Menteri Kesehatan Republik dalam Kabinet ke 2 dan 3 dari Sjahrir. Dalam Kabinet Sjarifuddin ia mendjadi Menteri Kesehatan. Djuga dalam kabinet Hatta (1948) ia mendjadi menteri. Semendjak zaman Renville Leimena mendjalan-

kan rol penting dalam urusan kemiliteran. Dalam KMB di Den Haag ia mendjadi ketua delegasi militer Republik.

Tn. 1946 pernah mendjadi anggota KNP.

Dr. Leimena adalah salah seorang pendiri dari perkumpulan pemuda Maluku dan sekarang mendjadi anggota Parkindo.

Mr. Wilopo.

Lahir di Purworedjo tanggal 21 Oktober 1909. Masuk sekolah rendah, Mulo, dan AMS di Jogja. Kemudian meneruskan peladjarannya di Technische Hogeschool Bandung, lalu pindah ke Rechtshogeschool dimana ia mendapat gelar Mr. di tahun 1942.

1933—1934 ia mendjadi guru di Perguruan Rakjat dan memimpin sekolah menengah perguruan tsb. Ia djuga mendjadi guru di Taman Dewasa Raya-Taman Siswa Djakarta. 1938 ia mendirikan dan memimpin Instituut Journalistiek.

1933 mendjadi ketua-muda Partindo Sukabumi, 1936 memimpin PPPI, 1937 mendirikan Gerakan Rakjat Indonesia.

Wilopo dizaman Republik mendjadi anggota PNI dan pernah mendjabat Menteri-muda Perburuhan dalam kabinet Amir. Sekarang ia mendjadi Menteri Perburuhan RIS.

Mr. Moh. Kosasih.

Mr. Mohammad Kosasih Purwanegara lahir pada 13 Maret 1912 di Tasikmalaja. Menuntut peladjaran pada Lagere School, Mulo dan AMS Bandung. Tahun 1932 masuk Rechthogeschool Djakarta dan tahun 1938 mendapat gelar Mr.

Ia kemudian bekerdja pada Dept. B.B. 1939—1942 mendjadi anggota dewan haminte Bogor, 1941—1942 anggota dewan kabupaten dan anggota dewan propinsi Djawa Barat.

1936—1937 mendjadi ketua perhimpunan mahasiswa Djakarta Unitas Studiosorum Indonesiensis dan penulis P.B.J.O.P., 1938—1939 mendjadi pegawai departemen urusan dalam negeri, 1939—1941 ketua tjab. „Pasundan” di Bogor. Ia djuga mendjadi anggota PBI koran Sport Indonesia bagian sepak Bola.

Setelah Wiranatakusumah dipilih mendjadi wali-negara Pasundan, Mr. Kosasih mendjadi sekretaris-nja. Kepada BFO ia menjumbangkan tenaganja jang tidak sedikit, terutama di komisi ketatanegaraan dan hukum-ketatanegaraan. Dalam kabinet RIS ia mendjadi Menteri Sosial.

H. Abdul Wachid Hasjim.

Dilahirkan tg. 12 Februari 1915 di Djombang. Mendapat pendidikannya disekolah agama.

1937 mendjadi penulis Nahdatul Ulama di Tjukir, 1938 ketua N.U. Djombang, 1939 ketua bagian pengadjaran dalam PB perkumpulan tsb. di Surabaya. 1940—1941 ketua MIAI.

Sekarang mendjadi anggota dewan pimpinan Masjumi. Wachid Hasjim pernah mendjadi Menteri Agama dalam kabinet pertama Republik.

Arnold Mononutu.

Dilahirkan di Menado pada tanggal 4 Desember 1898. Setamat sekolah rendah dan Middelbare Handelsschool ia pergi ke Nederland dan menuntut peladjaran untuk Middelbaar Nederlands. Di Universiteit Leiden ikut dalam college sedjarah kesusasteraan Belanda.

Di Paris ia menuntut peladjaran disekolah ilmu politik. 1927 ia mendjadi koresponden perusahaan Djepang „Mitsui Bussan Kaisha” dan ditahun 1930 mendjadi direktur Indonesische Cooperatieve Vereniging di Minahasa. Kemudian mendjadi guru dalam bahasa Perantjis di Perguruan Rakjat Djakarta.

1945 mendjadi kepala kantor distribusi di Ternate, 1946 pemimpin redaksi harian Menara Merdeka.

Nopember 1947 mendjadi wakil ketua parlemen sementara NIT. Dalam parlemen NIT ia mendjadi pemimpin fraksi progressief. Ia djuga mendjadi ketua Gabungan partai2 kebangsaan Indonesia (Gapki).

Dalam kabinet RIS Mononutu mendjadi Menteri Penerangan.

Sultan Hamid II.

Sultan Sjarif Hamid Algadrie II dari Pontianak, ialah putera alm. Sultan Pontianak, dilahirkan tg. 12 Djuli 1913. Mendapat pendidikan di Lagere School, dan HBS kemudian ke Technische Hogeschool di Bandung.

Tak lama sesudah itu, ia pergi ke Nederland dan masuk Militaire Academie di Breda. Ditahun 1933 mendjadi letnan ke 2, 1936 mendjadi letnan ke 1. Tahun 1941 ikut bertempur melawan Djepang di Balikpapan. September 1945 mendjadi penasehat politik pem. Hindia Belanda dan djuga adjudan-istimewa ratu Wilhelmina.

Ketika daerah-istimewa Kalimantan Barat di bentuk, ia diangkat mendjadi kepalanja. Sultan Ha-

mid djuga mendjadi ketua BFO. Baru2 ini ia diangkat mendjadi djenderal major KNIL.

Dalam kabinet RIS mendjadi Menteri Negara zonder portefeulle.

Mr. Moh. Roem.

Lahir 16 Mei 1908 di Parakan. Sekolah di HIS, Mulo, dan AMS, kemudian masuk Rechtshogeschool. 1940 mendapat gelar Mr. Setamat RHS, ia mendjadi advokat di Djakarta, 1936-1939 mendjadi ketua Badan Pekerdja „Pergerakan Penjadar”. 1937 ketua Studenten Islam Studieclub, 1937-1938 anggota redaksi madjallah „Moslimsch Reveil”, sedjak 1939 penasehat juridis dari Rumah Piatu Muslimin di Djakarta, dan 1942 penasehat juridis Perhimpunan Dagang Indonesia.

September 1945, Roem mendjadi anggota KNP, dan pernah pada suatu malam di Djakarta tertembak kakinja jang menjebabkan pintjang. Ditahun 1946 Menteri Dalam Negeri dalam kabinet ke-3 Sjahrir dan dalam kabinet pertama Amir. Ia ikut da-

lam perundingan di Linggadjadi dan Renville.

Setelah kabinet Amir djatuh, Roem mendjadi ketua delegasi Republik dalam perundingan dengan Belanda. Zaman pendudukan Belanda ia di internir di Bangka bersama2 Hatta.

7 Mei 1949 ia menghasilkan persetudjuan dengan Belanda jang terkenal dengan „Roem-Royen Statement”. Roem adalah anggota dewan Pimpinan Majelis. Th. 1949 mendjadi anggauta delegasi Republik dalam konperensi antar-Indonesia di Jogjakarta dan Djakarta. Dalam KMB ia mendjadi anggota delegasi Republik.

K. K. Djokjakarta